



TNI Pertanyakan Amunisi Bulgaria

■ Anggap Spesifikasi Bukan untuk Polri

JAKARTA, TRIBUN - Sebanyak 5.932 peluru berjenis Amunition Castior with high explosive fragmentation jump grenade yang dibeli Brimob dari Bulgaria, ternyata spesifikasinya tidak sesuai untuk polisi. Peluru berkaliber 40 milimeter tersebut dianggap sangat berbahaya dan mematikan. Alhasil, 5.000 peluru tersebut kini disimpan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Standar nonmiliter sudah jelas, sesuai Inpres nomor 9 dia atas 5,56 milimeter. Non militer di bawah itu," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Wuryanto, Selasa (10/10).

Dia menjelaskan, ada aturan yang membatasi jenis senjata yang bisa dimiliki polisi yaitu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata. Peluru itu dinilai melanggar aturan jika dimiliki polisi. Amunisi tajam yang dibeli Polri tersebut, juga mempunyai radius mematikan sembilan meter dan jarak capai 400 meter. Amunisi tersebut



TNI tidak punya senjata dengan kemampuan jenis itu

Wuryanto
Kepala Pusat Penerangan TNI

juga memiliki keistimewaan lain. Menurut Wuryanto, saat ditembakkan, amunisi tersebut akan dua kali meledak. Ledakan kedua akan melontarkan pecahan tubuh granat berupa logam kecil yang melukai dan mematikan sasaran tembak. Selain itu, jenis granat yang dibeli Polri juga bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari laras. "Ini luar biasa. TNI tidak punya senjata dengan kemampuan jenis itu," ujar Wuryanto.

Wuryanto mengatakan, pada Senin malam, ribuan amunisi sudah dipindahkan

ke gudang Mabes TNI. Sesuai katalog yang menyertai, ada sejumlah 5.932 amunisi dalam 71 koli disertai dengan katalog. Wuryanto mengatakan, TNI hanya menegakkan aturan yang berlaku. Mengenai penyimpanan oleh TNI, menurut Wuryanto, TNI hanya mengantisipasi potensi ancaman keamanan. "Amunisi seperti ini ditujukan untuk menghancurkan perkubuan. TNI bertanggung jawab selama penyimpanan. Pasti aman, karena kami punya standar keamanan," kata Wuryanto.

BPK Audit Senjata

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara memastikan, pihaknya telah membentuk tim audit investigasi untuk tujuan tertentu alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan. "Sudah (dibentuk) ya. Sedang berjalan," ujar Moermahadi.

Lantaran lagi bekerja, Moermahadi belum mendapatkan laporan terkini soal hasil tim audit investigasi untuk tujuan tertentu alutsista itu. Anggota VI BPK, Haris Azhar, mengatakan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Men-

teri Pertahanan Ryamizard Ryacudu awalnya menolak audit alutsista itu.

Namun, setelah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo, audit itu akhirnya tetap dilaksanakan. "Sebelumnya kan ada larangan dari Panglima atau Kemenhan untuk tidak bisa memeriksa aset senjata yang nilainya sekitar Rp 23 triliun, tahun kemarin. Tapi kita sampaikan ke Bapak Presiden dan Menkeu bahwa kalau ada aset negara satu rupiah pun tidak bisa kami periksa, bisa disclaimer. Akhirnya dipersilahkan," ujar Haris.

Dalam audit investigasi untuk tujuan tertentu tersebut, kata Haris, sekaligus akan diketahui ada atau tidaknya dugaan penyimpanan anggaran. "Itu implikasinya saja. Kami tidak bisa memastikan ada atau tidaknya (dugaan tindak pidana korupsi). Tapi bisa diketahui," ujar Haris.

Rencana audit investigasi untuk tujuan tertentu ini telah diungkapkan sejak Mei 2017. Anggota I BPK Agung Firman Sampurna menyebut, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengajukan permohonan audit tersebut. **(eri/dha/kps/wly)**